

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DI DESA
TAORA, KECAMATAN BUNTU MALANGKA,
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2020-2022**



NELLA RENTAMI

C0118394

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARATMAJENE
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DI DESA
TAORA, KECAMATAN BUNTU MALANGKA,
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN

**NELLA RENTAMI
C0118394**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DI DESA
TAORA, KECAMATAN BUNTU MALANGKA, KABUPATEN
MAMASA TAHUN 2020-2022**

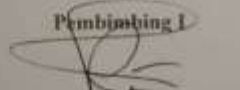


**NELLA RENTAMI
C0118394**

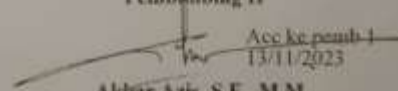
Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh


Pembimbing I


Muh. Rami Supu, S.E., M.M
NIDN. 9900001104

Pembimbing II


Akbar Azis, S.E., M.M
NIDN. 0903078602

**Mengetahui
Koordinator Program Studi**


Erwin, S.E., M.M
NIP. 198909092019031013

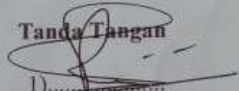
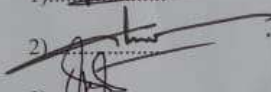
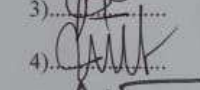
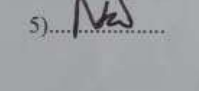
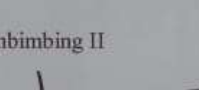
**PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DI DESA
TAORA, KECAMATAN BUNTU MALANGKA,
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2020-2022**

Dipersipkan dan Disusun Oleh

**NELLA RENTAMI
C0118394**


Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada tanggal 17 Mei 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muh. Ramli Supu, S.E.,M.M	Ketua	1)..... 
2. Akbar Azis, S.E.,M.M	Sekretaris	2)..... 
3. Sri Utami Permata, S.E.,M.M	Penguji I	3)..... 
4. Wulan Ayuandiani, S.E.,M.M	Penguji II	4)..... 
5. Nurwahyuni Syahrir, S.E.,M.M	Penguji III	5)..... 

Telah disetujui Oleh


Pembimbing I
Muh. Ramli Supu, S.E.,M.M
NIDN. 9900001104


Pembimbing II
Akbar Azis, S.E., M.M
NIDN. 0903078602

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 196703251994032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nella Rentami
NIM : C0118394
Program Studi : Manajemen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA TRHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DI DESA TAORA, KECAMATAN BUNTUMALANGKA, KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan dan diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majene, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Nella Rentami
C0118394

MOTTO

Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.

(Amsal 19:21)

Sejauh apapun kita berencana, rencanakanlah semuanya didalam Tuhan karena apa yang direncanakan didalam Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang Indah.

Waktu Tuhan selalu yang terbaik.

Ikuti arus dan biarkan alam mengambil jalannya

(Sehun Exo)

Lakukan saja yang terbaik versi diri mu, biarkan semuanya mengalir apa adanya.

Ikuti kata hatimu karena hati tidak pernah salah dalam menemukan jalannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “PENGARUH PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAORA, KECAMATAN BUNTU MALANGKA, KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022”.

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi peneliti berkat bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah Karsea, ibu Anita, yang telah mendoakan dan memfasilitasi saya selama kuliah hingga sampai tahap penulisan kripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Abdy.,M.Si.,Ph.D selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di kampus Universitas Sulawesi Barat.
3. Ibu Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
4. Bapak Erwin, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas Sulawesi Barat.
5. Bapak Muh. Ramli Supu, S.E., M.M selaku dosen pembimbing I dan Akbar Azis, S.E., M.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.

6. Wahdaniah, S.E., M.M sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas waktu dari awal hingga akhir studi.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Universitas Sulawesi Barat.
8. Pemerintah Desa Taora yang telah memfasilitasi dalam pengumpulan data penelitian.
9. Kedua adik saya Dindho Wilidri dan Wandra Sepries, serta saudara saudara saya di majene Nova Widiyanto, Roselti, Cherli Fernando dan Septian Dwi Putra yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
10. Floris Juang dan Insan Sriwana yang menjadi *suport system*, teman seperjuangan, dan tempat berkeluh kesah selama kuliah terlebih dalam pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Majene, 20 Mei 2024

Nella Rentami

ABSTRAK

NELLA RENTAMI, Pengaruh Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Belanja Pembangunan Desa Di Desa Taora, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022, dibimbing oleh Muh. Ramli Supu dan Akbar Azis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan badan usaha milik desa terhadap belanja pembangunan Desa Taora. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tentang data pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan belanja Desa di Desa Taora Tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh variabel pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap belanja pembangunan Desa Taora , menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} -1,829 < t_{tabel} 2,032$ dan $sig\ 0,076 > 0,05$. Artinya, bahwa pendapatan Badan Usaha Milik Desa Tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan Desa Taora.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Belanja pembangunan desa.

ABSTRACT

NELLA RENTAMI, The Influence of Village-Owned Enterprise Income on Village Development Expenditures in Taora Village, Buntu Malangka District, Mamasa Regency in 2020-2022, supervised by Muh. Ramli Supu and Akbar Azis.

This research aims to determine the effect of income from village-owned enterprises on development expenditure in Taora Village. The type of research used in this research is quantitative descriptive. The data source in this research is secondary data in the form of a report on income data for Village-Owned Enterprises and Village expenditure in Taora Village for 2020-2022. The sampling technique used was a saturated sampling technique and the data analysis technique used was simple linear regression analysis using the SPSS 25 application. The results of the analysis showed that the influence of the income variable of Village-Owned Enterprises (BUMDes) on Taora Village development expenditure, showed that the value $t_{count} -1.829 < t_{table} 2.032$ and $sig\ 0.076 > 0.05$. This means that the income of Village-Owned Enterprises does not have a positive and insignificant effect on Taora Village development expenditure.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village development expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian.....	8
Manfaat Teoritis	8
Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
Deskripsi Teori	9
Penelitian Terdahulu	20

Kerangka Konseptual	23
Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
Jenis Penelitian	26
Lokasi dan Waktu Penelitian	26
Jenis dan Sumber Data.....	27
Populasi dan Sampel.....	27
Metode Pengumpulan Data.....	28
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	29
Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
Deskripsi Data.....	43
Hasil Penelitian	46
Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	57
Kesimpulan	57
Keterbatasan Penelitian	57
Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa, Desa Taora Tahun 2020- 2022 ...	5
Tabel 1.2	Belanja Pembangunan Desa Taora.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	27
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4.1	Daftar Perangkat Desa.....	38
Tabel 4.2	Anggaran Pendapatan Desa Taora Tahun 2020-2022.....	45
Tabel 4.3	Anggaran Belanja Pembangunan Desa Taora Tahun 2020-2022	45
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas Tahun 2020-2022	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi Tahun 2020-2022	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Persamaan Linear	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Parsial (t) Tahun 2022-2022	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	53

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
	Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	21
	Gambar 2.2 Kerangka Pikir	25
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Taora	38
	Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 2020.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu desa tentu memiliki pemimpin untuk memimpin masyarakat dalam kehidupan keseharian sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, terkhusus pemerintah desa yang menjadi wakil pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dan masih banyak lagi tugas dari seorang pemerintah desa. Salah satu tugas dari pemerintah desa adalah mengelola pendapatan desa yang kemudian pendapatan desa tersebut digunakan dalam pembangunan desa.

Suatu desa tentunya akan selalu ada pendapatan desa. Pendapatan desa dapat berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Dalam Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa, dijelaskan tentang sumber-sumber pendapatan desa yaitu:

1. Pendapatan desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 1,0% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan untuk desa. Bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk

desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

3. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 dijelaskan pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa (UU No. 6, 2014). Selain itu di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian kelima keuangan desa, dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa, dapat diketahui bahwa setiap desa memiliki pendapatan masing-masing dan tidak ada desa yang tidak memiliki pendapatan.

Salah satu pendapatan asli desa yaitu hasil usaha desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pendapatan desa ini digunakan dalam membiayai belanja desa guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Kelompok klasifikasi belanja desa di atas dapat dilihat bahwa salah satu belanja yang dibutuhkan dalam desa adalah belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan seluruh pengeluaran dari rekening desa yang digunakan dalam seluruh rangkaian pembangunan dalam desa. Adapun klasifikasi sub bidang yang biasanya digunakan dalam pembangunan desa antara lain: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumberdaya mineral, dan pariwisata.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, belanja pembangunan desa tidak hanya kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata, melainkan sesuai dengan yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat. (UU No. 6, 2014)

Menurut Afifuddin dalam Immanuel (2021) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan desa pada hakikatnya bukan cuma dilakukan oleh pemerintah desa saja melainkan berkoordinasi dengan masyarakat desa dengan pembagian tugas seperti pemerintah menyediakan sarana-prasarana

pembangunan sementara masyarakat yang bertindak melakukan pembangunan dengan bantuan pemerintah (Suparno, 2001). Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 6, 2014). Hal ini berlaku juga untuk Desa Taora sebagai salah satu desa yang ada di Indonesia.

Desa Taora merupakan desa yang berada di Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah penduduk Desa Taora sebanyak 516 jiwa (BPS, 2020) dan luas wilayah 20,17 km². Desa Taora berada 6 km dari jalan poros dengan akses jalan yang sulit untuk dijangkau. Hal ini membuat pembangunan dalam desa membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu adanya analisis bagaimana pengaruh pendapatan yang diperoleh desa Taora yaitu hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pembangunan yang ada di Desa Taora. Untuk memperjelas tentang jumlah pendapatan dan belanja Desa Taora dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Pendapatan BUMDes Desa Taora Tahun 2020-2022

No.	Bulan	Pendapatan		
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Januari	480.000	480.000	840.000
2.	Februari	960.000	960.000	480.000
3.	Maret	1.200.000	560.000	720.000
4.	April	1.200.000	720.000	396.000
5..	Mei	960.000	720.000	840.000
6.	Juni	1.200.000	624.000	627.000
7.	Juli	960.000	600.000	840.000
8.	Agustus	720.000	600.000	920.000
9.	September	960.000	672.000	900.000
10.	Oktober	480.000	168.000	600.000
11.	November	720.000	480.000	960.000
12.	Desember	1.080.000	456.000	240.000
Jumlah		10.920.000	8.468.000	6.800.000

Sumber: Laporan Pendapatan BUMDes Desa Taora 2020-2022

Tabel 1.2 Belanja Pembangunan Desa Taora Tahun 2020-2022

No.	Bulan	Belanja Pemabngunan		
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Januari	8.610.000	24.200.000	17.200.000
2.	Februari	10.000.000	39.625.000	13.200.000
3.	Maret	9.000.000	24.650.000	25.430.000
4.	April	10.000.000	19.600.000	33.467.000
5..	Mei	9.200.000	18400000	29.898.000
6.	Juni	10190000	46.475.000	12.118.000
7.	Juli	9.000.000	23.458.000	17.700.000
8.	Agustus	12.000.000	19.940.000	25.000.000
9.	September	6.000.000	52.500.000	23.000.000
10.	Oktober	11.000.000	33.255.000	31.000.000
11.	November	7.000.000	13.550.000	34.000.000
12.	Desember	8.000.000	165.585.000	25.000.000
Jumlah		110.000.000	481.238.000	287.013.000

Sumber: Laporan APBDes Taora tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat pendapatan asli desa dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2020 sebesar Rp 10.920.00, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.452.000 dimana jumlah

pendapatan sebesar Rp. 8.468.000 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.668.000 menjadi Rp. 6.800.000.

Kemudian pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah belanja pembangunan pada tahun 2020 sebesar Rp.110.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 371.238.000 menjadi Rp. 481.238.000, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 194.225.000 menjadi Rp. 287.013.000.

Permasalahan yang terjadi dari penjelasan diatas yaitu pendapatan Badan Usaha Milik Desa mengalami penurunan setiap tahunnya namun belanja pembangunan desa mengalami naik turun (tidak stabil), dan dari hal ini dapat dilihat bahwa ketika pendapatan desa mengalami penurunan maka belanja pembangunan desa mengalami peningkatan juga ketika pendapatan desa mengalami penurunan maka belanja pembangunan desa juga mengalami penurunan.

Sukirno (2016) berpendapat pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Menurut Halim (2012) belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja fisik lainnya. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa (Hoesada, 2014).

Hasil penelusuran pustaka yang diperoleh dari beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Sari

(2010) yang meneliti Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa dimana adanya pemberian alokasi dana desa yang menghasilkan pembangunan berupa pembangunan infrastruktur. Demikian pula penelitian yang dilakukan Suhairi (2016) yang meneliti tentang Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa di Desa Kepyayang, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2019) di desa Sambilawang pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa hanya 47% dimana hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh pendapatan desa tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa pembahasan terkait masalah serta terdapatnya beberapa perbedaan peneliti terdahulu, maka dilakukan penelitian mengenai bagaimana kemampuan dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap belanja pembangunan di Desa Taora, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan judul penelitian yaitu ***“Pengaruh Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Terhadap Belanja Pembangunan Di Desa Taora Tahun 2020-2022”***

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh terhadap belanja pembangunan Desa Taora tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan badan usaha milik desa terhadap belanja pembangunan Desa Taora.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara pendapatan badan usaha milik desa terhadap belanja pembangunan pada desa sehingga penelitian ini tidak hanya ditulis melainkan memberikan manfaat bagi pembaca.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pengembangan pengetahuan, terkhusus dalam mendapatkan dan mengelola data. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan terhadap pemerintah Desa Taora baik yang sekarang menjabat maupun pemerintah-pemerintah selanjutnya di dalam meningkatkan pendapatan desa dengan memanfaatkan potensi desa dan juga dalam pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Definisi Desa

Sumeru (2016) berpendapat bahwa desa merupakan sebuah wilayah tempat tinggal dimana terdiri dari beberapa kepala keluarga dan memiliki pemimpin. Desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan dan desa sendiri di pimpin oleh seorang kepala desa. Secara etimologi kata Desa berasal dari kata Sansekerta yakni “Deca“ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Para ahli juga memiliki pendapat mengenai definisi desa. V.Wiratna Sujarweni dalam Elsa, dkk (2020) berpendapat bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

R.Bintarto (2010) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain disekitarnya. Selanjutnya, menurut Paul H. Landis dalam Chikmawati (2019) mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga

pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang. Untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa merupakan suatu lingkungan atau wilayah yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan memiliki pemerintahan sendiri.

2.1.2 Pendapatan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 pasal 9 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa tersebut terdiri dari

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa (BUMDes), hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

2. Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer

terdiri dari dana desa (DD), bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah (BPRD), alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/ kota. Uraian dari masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ kota dan Retribusi Daerah

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota, berdasarkan ketentuan, 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan

hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/ Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

c. Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan, kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/ Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/ kota

Pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/ kabupaten/ kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

3. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pendapatan Desa dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan desa yaitu:

- a. Pendapatan desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain hasil pendapatan desa yang sah
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/ kota paling sedikit 1,0% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan untuk desa

- c. Bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat.

2.1.3 Pendapatan Badan Usaha Milik Desa Belanja (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No 6, 2014).

Badan usaha milik desa juga dijelaskan dalam Permendagri No. 43 Tahun 2014 yaitu: pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes. Kemudian dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 juga dijelaskan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat

inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

Menurut Sohib (2018) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Dari kedua pendapat diatas dapat didfinisikan bahwa Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan penghasilan/aktiva yang timbul dari adanya usaha yang dilakukan di desa pada satu periode tertentu.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 bertujuan untuk

1. Meningkatkan Perekonomian
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga.
5. Membuka lapangan kerja
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

2.1.4 Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113/ 2014, BAB IV bagian kedua pasal 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diketahui bahwa belanja modal meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pemerintah desa menggunakan APBD Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Belanja Desa dibagi dalam kegiatan 5 Desa, yaitu:

8. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaannya dibayar setiap bulan.

9. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, seperti pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan/ material, pemeliharaan, cetak/

penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/ rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

10. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembangunan desa adalah salah satu hal pokok yang dibutuhkan di dalam sebuah desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Seperti dikatakan dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa tujuan dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU No. 6, 2014).

Belanja pembangunan desa adalah seluruh pengeluaran dari rekening desa dalam rangka membiayai pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Desa. Adapun klasifikasi sub bidang yang biasanya digunakan dalam pembangunan desa antara lain: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumberdaya mineral, dan,

pariwisata

2.1.5 Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU RI No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 10 dan pasal 71 ayat 1 tentang Desa, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri terdiri dari lima tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati bersama

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes (Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20)

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35-36 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No.13, 2014)

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37-38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa (Permendagri No. 113, 2014). Gambaran rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa dapat kita lihat pada gambar berikut

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2019

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman yang dibutuhkan dalam memulai suatu penelitian, guna memperbanyak teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sari (2010) Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	Variabel X yaitu alokasi dana desa, kemudian variabel Y yaitu pembangunan desa.	Hasil dari penelitian ini yaitu : alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa dimana adanya pemberian alokasi dana desa yang menghasilkan pembangunan berupa pembangunan infrastruktur.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sari adalah sama-sama meneliti tentang hubungan pendapatan desa terhadap pembangunan desa	Perbedaannya yaitu Sari meneliti tentang alokasi dana desa, sementara dalam penelitian ini meneliti pendapatan asli desa
2.	Suhairi (2016) Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Di Desa Kepayang	Pendapatan sebagai variabel X dan belanja Desa sebagai variabel Y.	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan Y, dan korelasi diantaranya sangat kuat dan dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu pendapatan desa sangat berpengaruh terhadap belanja Desa di Desa kepayang.	Persamaan dalam penelitian ini adalah memiliki variabel penelitian yang sama yaitu variabel X yaitu pendapatan desa dan variabel Y yaitu belanja pembangunan	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang pendapatan desa yang berfokus pada pendapatan asli desa, sementara Suhairi meneliti semua komponen pendapatan desa
No	Nama Dan Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

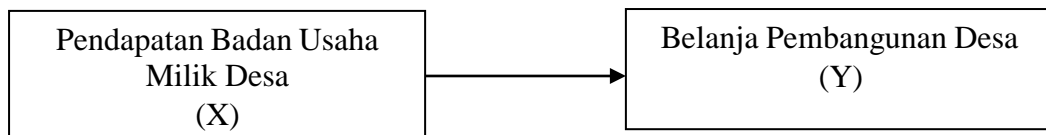
3.	Lia Sulistiyoningtyas (2017) Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron	Merupakan Variabel X1, Pendapatan Asli Desa Merupakan Variabel X2 Dan Belanja Desa Merupakan Variabel Y	1. Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa. 2. Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama meneliti tentang pendapatan asli desa	Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Lia meneliti dua indikator pendapatan desa yaitu alokasi dana desa dan pendapatan asli desa.
4.	Dewi dan Irama (2018) Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan.	Kemiskinan sebagai variabel Y2, Belanja Desa sebagai variabel Y1, Pendapatan Desa sebagai variabel X1 dan Alokasi dana Desa sebagai variabel X2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan desa dan alokasi dana desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa dan kemiskinan	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh pendapatan desa	Perbedaannya adalah variabel Y dari penelitian yang dilakukan Dewi dan Irma adalah belanja desa secara keseluruhan dan juga kemiskinan
5.	Nur Kholifatul Hidayah, dkk (2019) Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sambilawang	Pendapatan Desa sebagai variabel X dan Belanja Desa sebagai variabel Y	Pendapatan Desa mampu memenuhi belanja Desa Sambilawang sebesar 47% dan selebihnya membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat	Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu menganalisis pendapatan desa	Perbedaannya yaitu meneliti tentang belanja desa secara keseluruhan dan pendapatan desa secara keseluruhan sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti belanja pembangunan dan pendapatan asli desa
6	Anisa Riski Amnan, dkk (2019) Pengaruh Alokasi Dana Desa dan	Alokasi Dana Desa Merupakan Variabel X1, Pendapatan Asli Desa Merupakan Variabel X2 Dan	Hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, sedangkan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pengaruh pendapatan asli	Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amnan dkk, meneliti seluruh belanja desa,

No	Nama Dan Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di kecamatan Malimbong Balepe	Belanja Desa Merupakan Variabel Y	variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.	desa.	sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti belanja pembangunan desa
7.	Rita Martini dkk (2020) Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa di Kabupaten Lahat	X1 = Pendapatan Asli Desa (PADes) X2 = Dana Desa (DD) X3= Alokasi Dana Desa (ADD) X4 = Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Y= Belanja Desa Bidang Pembangunan	Secara parsial hanya DD dan ADD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan Desa. Kondisi ini mengindikasikan belanja Desa dibidang pembangunan diperoleh dari DD dan ADD. Secara simultan PADes, DD, ADD, dan BHPRD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pembangunan Desa dengan nilai koefisien determinan sebesar 45,20%.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendapatan desa terhadap belanja pembangunan desa.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu komponen pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Notoatmodjo (2018) kerangka konseptual penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual menjelaskan

mengenai keberadaan variabel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu pendapatan Badan Usaha Milik Desa sebagai variabel X dan belanja pembangunan Desa sebagai variabel Y.



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

Gambar di atas dapat dilihat pendapatan badan usaha milik desa sebagai variabel independen (variabel X) mempengaruhi belanja pembangunan desa sebagai variabel dependen (variabel Y).

2.4 Hubungan Antar Variabel

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Rachmat (2010) belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk investasi (proyek-proyek), baik berbentuk fisik maupun nonfisik.

Adapun penelitian terdahulu variabel dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas (2017) tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron memperoleh hasil yaitu pendapatan asli desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama (2018) dengan judul Pengaruh

Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan, memperoleh hasil yaitu bahwa pendapatan desa dan alokasi dana desa berpengaruh langsung terhadap anggaran belanja desa dan kemiskinan. Namun berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa Riski Amnan, dkk (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di kecamatan Malimbong Balepe, memperoleh hasil pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Martono (2010) dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau dirangkum kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Oleh karena itu berdasarkan kerangka konseptual dan hubungan antar variabel penelitian terdahulu maka dibuat suatu hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan yang akan diteliti yaitu **“Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan desa di Desa Taora Tahun 2020-2022”**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan berfokus pada deskripsi secara nyata objek-objek penelitian yang ada, dan terhadap angka-angka yang akan digunakan dalam menghitung pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan realisasinya terhadap belanja pembangunan Desa di Desa Taora

Menurut Sujarweni (2014) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan pengertian metode penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono (2019) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Taora, kecamatan Buntu Malangka, kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 4 bulan mulai dari Desember 2022- Maret 2023.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu																	
		Desember				Januari					Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■														
2.	Pengumpulan Data					■	■	■	■	■									
3.	Pengolahan Data										■	■	■	■					
4.	Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■

Sumber: Data di Olah oleh Peneliti 2023

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat dihitung secara langsung atau data yang berbentuk angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang dimaksud adalah jumlah pembangunan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dari peneliti sebelumnya atau data yang berupa dokumen-dokumen. Dalam hal ini data sekunder penelitian ini adalah berupa laporan tentang data pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan belanja Desa di Desa Taora Tahun 2020-2022.

3.4 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2019) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Taora Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Taora periode 2020 sampai 2022

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2019) *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dalam hal ini sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Desa (APBDes) Desa Taora Tahun 2020-2022

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah mengambil langsung data di kantor Desa Taora. Data yang diambil adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Desa (APBDes) dari tahun 2020-2022.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2019) adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

a. Variabel independen (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No 6, 2014).

b. Variabel dependen (Variabel Y)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah belanja pembangunan desa. Belanja desa menurut Permendagri No. 113/2014, BAB IV bagian ke 2 pasal 12 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel beserta operasionalnya dijelaskan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Satuan
1.	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (X)	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan penghasilan/aktiva yang timbul dari adanya usaha yang dilakukan di desa pada satu periode tertentu.	$Y = R + W + i + P$ Y= Pendapatan R= Sewa W= Upah/Gaji i= interest (pendapatan bunga) P=Profit/keuntungan Sumber: Harubali (2023)	Rupiah
2.	Belanja Pembangunan Desa (Y)	Belanja pembangunan desa adalah seluruh pengeluaran dari rekening desa dalam rangka membiayai pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Desa	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Kawasan pemukiman 5. Kehtanan dan lingkungan hidup 6. Perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Energi dan sumberdaya mineral, dan 8. Pariwisata Sumber: Permendagri No. 21 Tahun 2011	Rupiah

Sumber: Data di Olah oleh Peneliti 2023

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis pertahun karena terbatasnya data penelitian. Menurut Sugiyono (2019) regresi sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen (terikat). Mengola 3 kali karna terbatasnya data.

Model probabilistik untuk regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Belanja Pembangunan Desa

X = Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a = Intercept

b = Koefisien regresi

Guna mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji hipotesis. Pengujian hipotesis terdiri dari beberapa pengujian, yakni sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran data dari rata-

ratanya, nilai maksimum dan minimum. Sedangkan menurut Sugiyono (2019) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Pengujian Asumsi

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016).

Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data penelitian terdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka penelitian tidak terdistribusi normal

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Kuncoro (2013), heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2016) heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terdapat ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat berbagai cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, yaitu diantaranya: grafik plot, uji park,

uji glejser, dan uji white. Untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, artinya model tidak melanggar uji heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, artinya model melanggar uji heteroskedastisitas.

c. Uji Auto Korelasi (r)

Menurut Ghozali (2016) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

3. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Uji statistik t menurut Kuncoro (2011) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

- 1) Apabila $t_{tabel} > t_{hitung}$ atau signifikan lebih dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.
- 2) Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau signifikan kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Desa Taora

Desa Taora merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk 492 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 268 jiwa dan perempuan sebanyak 224 jiwa. Desa Taora terletak dalam titik koordinat dengan luas wilayah administrasi 20,17 km² dan ketinggian 1.141,00 (mdl). Desa taora berbatasan langsung dengan desa Kebanga di sebelah timur, Dusun Sumua' di sebelah barat, Desa Malatiro di sebelah Utara, dan Desa Bumal di sebelah Selatan. Jarak antara Desa Taora dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 6 km dengan waktu tempuh 30 menit (kendaraan Motor).

4.1.2 Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat

Desa Taora merupakan salah satu desa di Kecamatan Buntu Malangka yang memiliki beberapa .. dalam menunjang kesejahteraan rakyat yaitu adanya satu unit Paud/TK , 1 unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah tenaga guru Paud/TK sebanyak 3 orang, Sekolah Dasar sebanyak 7 orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15 orang . Desa Taora juga memiliki 1 unit puskesmas pembantu (PUSTU) dengan 3 orang perawat dan 1 orang bidan. Selain puskesmas pembantu Desa Taora juga memiliki 2 unit posyandu. Penduduk Desa Taora juga 100% menganut agama kristen protestan sehingga memiliki 2 unit gereja yang berlokasi di Dusun Taora

dan di Dusun Sirande.

4.1.3 Pertanian dan Peternakan

Desa Taora sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani memiliki lahan yang terbagi menjadi 3 yaitu: lahan pemukiman, lahan persawahan, dan lahan perkebunan. Jenis tanaman yang diusahakan masyarakat Desa Taora adalah padi sebagai hasil sawah, kopi dan nanas sebagai hasil kebun dan sayur-sayuran, rempah-rempah, dan buah-buahan sebagai hasil lahan pemukiman. Selain bertani penduduk Desa Taora juga beternak. Adapun ternak yang diusahakan oleh penduduk Desa Taora yaitu: babi, kerbau, sapi, ayam dan juga budidaya ikan mas.

Hasil-hasil pertanian dan peternakan penduduk Desa Taora membantu masyarakat dalam meminimalisir pembelian bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil dari pertanian penduduk seperti beras, kopi dan nanas biasanya dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan seperti pakaian dan lain-lain. Adapun upaya dari Desa untuk memajukan pertanian dan peternakan di Desa Taora makan di bentuk kelompok tani yang terdiri dari 2 kelompok laki-laki, dan 2 kelompok perempuan. Kelompok laki-laki bekerja di bidang perkebunan yang mengusahakan tanaman kopi, dan kelompok perempuan bekerja di sekitar pekarangan rumah dengan usaha tanaman sayur-sayuran, rempah-rempah, dan buah-buahan.

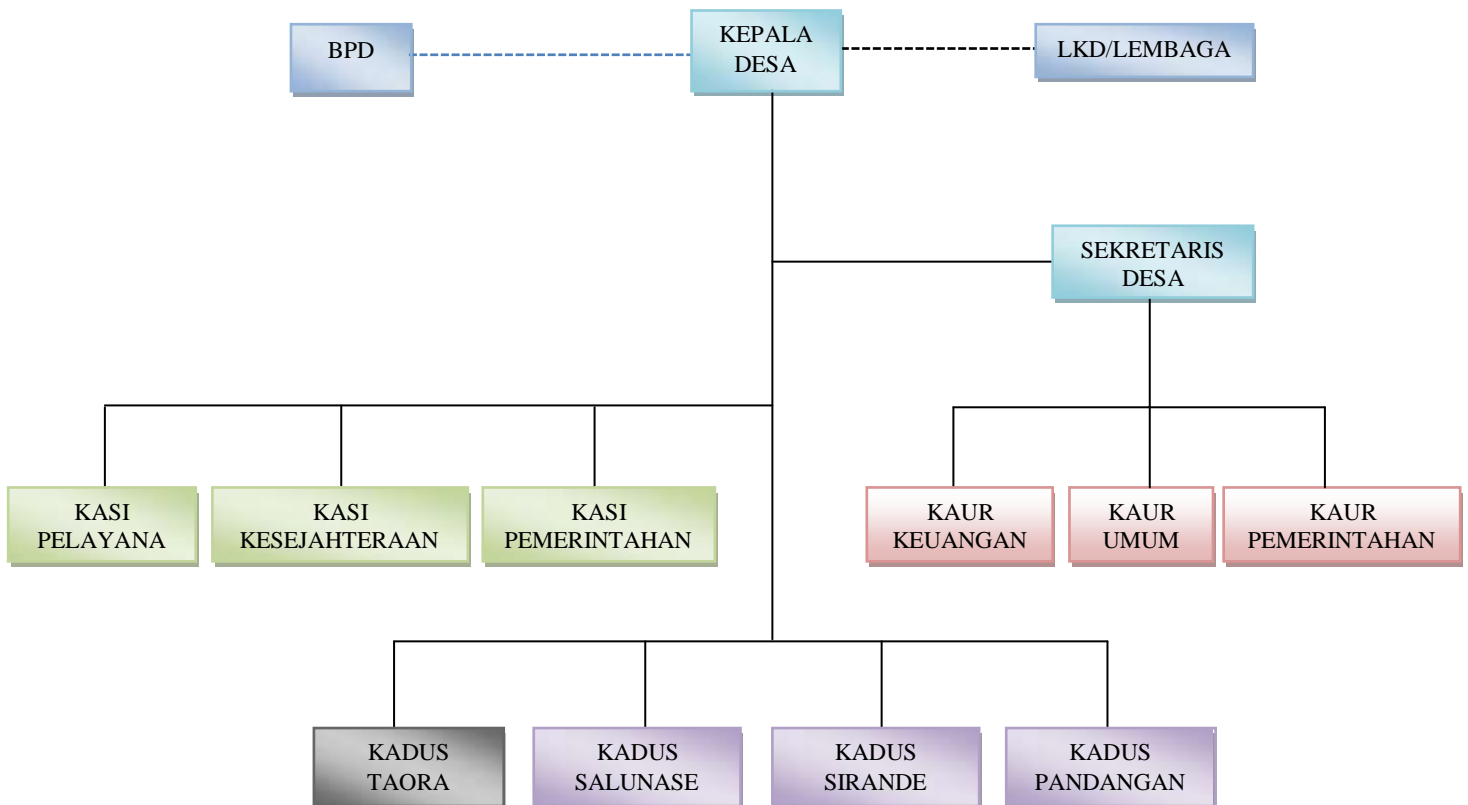
4.1.4 Pemerintahan

1. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi diperlukan struktur organisasi untuk mengatur

jalannya organisasi dengan baik sehingga tujuan dan fungsi dari organisasi dapat terarah dengan baik. Adapun susunan struktur organisasi Desa Taora dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Taora



..... Hubungan kumulatif kepala desa dan BPD

----- Hubungan kumulatif kepala desa dan LKD/Lembaga

———— Hubungan pemerintah kepala desa dan perangkat desa

Sumber : Kantor Desa Taora tahun 2023

2. Daftar Perangkat Desa Taora

Menurut Perda No. 2 Tahun 2018, perangkat desa merupakan elemen pendukung yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan berupa bentuk teknis maupun kewilayahan dalam sekretariat desa

(Perda No. 2 Tahun 2018). Adapun daftar perangkat Desa Taora sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Perangkat Desa Taora

No	Jabatan	Nama	No	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Mordekai	8.	Kasi Kesejahteraan	Dolvison
2.	Kepala Desa	Saul Taedy	9.	Kasi Pemerintahan	Rinsno
3.	Sekretaris Desa	Jorni	10.	Kadus Taora	Yopi
4.	Kaur perencanaan	Salrinto	11.	Kadus Salunase	Susanto
5.	Kaur Umum	Dwi Karpri	12.	Kadus Sirande	Roni
6.	Kaur Keuangan	Koliandri	13.	Kadus Pandangan	Admin
7.	Kasi Pelayanan	Sudariatno			

Sumber: Laporan APBDes Desa Taora tahun 2022

3. Fungsi Perangkat Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmura

masyarakat desa.

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa dalam dan diluar pengadilan atau membujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam hal administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pelaksanaan penataan administrasi dan persediaan prasarana perangkat desa, pengurusan aset, inventarisasi, rapat, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Pelaksanaan urusan persuratan, pengarsipan, dan ekspedisi.
- 3) Merumuskan aturan atau kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) Pelaksanaan perancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data-data pembangunan, serta *monitoring* dan evaluasi kegiatan.
- 5) Pengurusan administrasi keuangan seperti sumber-sumber penerimaan, pengeluaran, dan verifikasi penghasilan.

6) Pengelolaan buku administrasi desa sesuai dengan bidang atau keputusan kepala desa, serta pemberian tugas lainnya

c. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum merupakan salah satu unsur staf sekretariat yang membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan kedinasan atau pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adapun fungsi kepala urusan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- 2) Menyediakan prasarana kantor dan perangkat desa
- 3) Tata kelola kearsipan dan persuratan
- 4) Pelaksanaan administrasi aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas
- 5) Mempersiapkan pertemuan atau rapat
- 6) Pelaksanaan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala urusan keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksana pengurusan administrasi keuangan,
- 2) Pelaksana kepengurusan sumber-sumber pendapatan dan pengeluarandes.
- 3) Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan laporan serta evaluasi kegiatan dibidang keuangan desa,
- 4) Pelaksana perumusan kebijakan urusan keuangan,

5) Pengelolaan keuangan desa dan pungutan desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan.

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan administrasi pendukung. Fungsi kepala urusan perencanaan adalah:

- 1) Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- 2) Menyusun laporan program atau kegiatan desa.
- 3) Mengkoordinasikan kepengurusan perencanaan desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan merupakan teknisi di bidang pemerintahan yang membantu kepala desa dalam melakukan berbagai kegiatan operasional desa. Dalam melakukan tugasnya kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja desa.
- 2) Melaksanakan pembinaan perihal kependudukan dan pertahanan.
- 3) Mengelola data dan profil desa
- 4) Menyusun rencana regulasi desa.
- 5) Melaksanakan tata kelola wilayah desa
- 6) Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, serta tugas kedinasan lainnya.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan memiliki tugas membantu kepala desa dalam

pelaksanaan operasional di bidang kesejahteraan desa. Dalam melakukan tugasnya kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan kemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan motivasi di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup.
- 3) Menyusun laporan dan evaluasi program kegiatan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa di bidang pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan operasional desa. Adapun fungsi kepala seksi pelayanan yaitu:

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat
- 2) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang implementasi hak dan kewajiban masyarakat
- 3) Pelaksanaan teknis kependudukan masyarakat seperti pernikahan, perceraian, kelahiran, dan kematian.
- 4) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
- 5) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa.

i. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan salah satu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah-wilayah desa. Selain melaksanakan tugasnya kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 2) Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 4) Melaksanakan pembinaan tentang ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan, upaya perlindungan masyarakat, serta tata kelola wilayah.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Laporan Realisasi Pendapatan Badan Usaha Milik Desa dan Belanja Pembangunan Desa Taora Tahun 2020-2022

Menurut Wiratna, 2015 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Desa (APBDes) merupakan salah satu bentuk laporan pemerintah desa mengenai perencanaan keuangan dan realisasinya terhadap semua kegiatan desa yang disepakati pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dirancang dalam suatu periode berjalan. Pendapatan desa berasal dari Dana Desa (DD), hasil pajak daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti:

- 1) Hasil Usaha Desa: Hasil usaha desa adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil usaha desa, antara

lain hasil BUMDes.

- 2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, bangunan Desa, mata air milik Desa, dan berbagai kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Adapun data dalam penelitian ini adalah data mengenai Realisasi Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam dan juga data Realisasi Belanja Pembangunan di Desa Taora tahun 2020-2022. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taora Tahun 2020-2022

No.	Bulan	Pendapatan		
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Januari	480.000	480.000	840.000
2.	Februari	960.000	960.000	480.000
3.	Maret	1.200.000	560.000	720.000
4.	April	1.200.000	720.000	396.000
5..	Mei	960.000	720.000	840.000
6.	Juni	1.200.000	624.000	627.000
7.	Juli	960.000	600.000	840.000
8.	Agustus	720.000	600.000	920.000
9.	September	960.000	672.000	900.000
10.	Oktober	480.000	168.000	600.000
11.	November	720.000	480.000	960.000
12.	Desember	1.080.000	456.000	240.000
Jumlah		10.920.000	8.468.000	6.800.000

Sumber: Laporan APBDes Taora 2020-2022

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pembangunan Desa Taora Tahun 2020-2022

No.	Bulan	Belanja Pembangunan		
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Januari	8.610.000	24.200.000	17.200.000
2.	Februari	10.000.000	39.625.000	13.200.000
3.	Maret	9.000.000	24.650.000	25.430.000
4.	April	10.000.000	19.600.000	33.467.000
5..	Mei	9.200.000	18400000	29.898.000
6.	Juni	10190000	46.475.000	12.118.000
7.	Juli	9.000.000	23.458.000	17.700.000
8.	Agustus	12.000.000	19.940.000	25.000.000
9.	September	6.000.000	52.500.000	23.000.000
10.	Oktober	11.000.000	33.255.000	31.000.000
11.	November	7.000.000	13.550.000	34.000.000
12.	Desember	8.000.000	165.585.000	25.000.000
Jumlah		110.000.000	481.238.000	287.013.000

Sumber: Laporan APBDes Desa Taora Tahun 2020-2022

Dalam tabel 4.2 diatas dapat kita lihat pendapatan asli desa dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2020 sebesar Rp 10.920.00, dan

mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.452.000 dimana jumlah pendapatan sebesar Rp. 8.468.000 dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.668.000 menjadi Rp. 6.800.000. Hal ini diakibatkan karena badan usaha desa hanya berfokus pada satu bidang tertentu sehingga pendapatan badan usaha desa tidak maksimal dan bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kemudian pada tabel 4.3 dapat dilihat jumlah anggaran belanja pembangunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 110.000.000, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran belanja desa sebesar Rp. 481.238.000, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan anggaran belanja pembangunan desa sebesar Rp. 287.013.000. anggaran belanja desa ini terdiri dari sub bidang pos kesehatan, posyandu, jaringan komunikasi dan informasi dan lain-lain. Hal ini di akibatkan karena belanja pembangunan ini disesuaikan dengan bidang pembangunan yang dibutuhkan dalam desa pada periode/tahun tersebut, sehingga anggaran dan realisasi belanja pembangunan akan berubah ubah sesuai dengan kebutuhan dalam desa tersebut.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Data

Analisis pendapatan dan belanja pembangunan desa Taora bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan Desa Taora terhadap belanja pembangunan yang ada di Desa Taora. Penelitian ini menggunakan data Laporan Pendapatan dan Belanja Desa Taora Tahun 2020-2022. Dalam menganalisis peneliti menggunakan alat bantu SPSS 25 dalam pengolahan datanya, dan dianalisis pertahunnya. Adapun

penjabaran dari hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

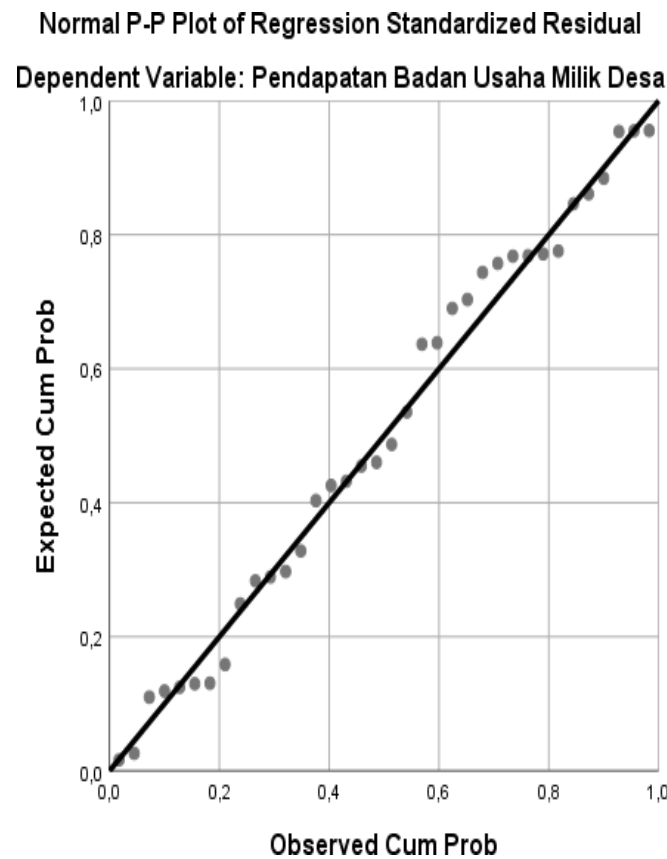
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normatif bertujuan untuk memeriksa apakah dalam suatu regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya berdistribusi normal. (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *p-plot*. Distribusi data yang normal atau mendekati normal dapat dikatakan bahwa sebuah model regresi baik. Dalam mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Kriteria penerimaan normalitas adalah:

- 1) Jika data meluas di sekitar diagonal dan searah dengan diagonal atau jika histogram menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data diagonal dan/ atau tidak diagonal atau historinya tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tersebut melanggar asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Output SPSS 25 (2023)

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik (data) meluas searah dengan diagonal yang artinya bahwa data penelitian pada tahun 2020 - 2021 terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas, sesuai dengan syarat pengambilan keputusan yaitu jika data meluas di sekitar diagonal maka data tersebut memenuhi syarat normalitas. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terdapat ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Untuk

melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi yakni:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, artinya model tidak melanggar uji heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, artinya model melanggar uji heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas anatar pendapatan badan usaha desa terhadap belanja pembangunan desa di Desa Taora dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	801960,029	57064,450		14,054	,000
	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa	-,003	,002	-,299	-1,829	,076

a. Dependent Variable: Belanja Pembangunan
Sumber: Data Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu $0,076 > 0,05$ yang berarti model regresi tidak melanggar uji heteroskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga penelitian layak diteliti lebih lanjut.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi maka dilakukan uji Durbin Waston dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1). Jika angka DW di bawah -2 dan diatas +2 berarti ada autokorelasi positif
- 2). Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada gejala autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi antara pendapatan badan usaha milik desa terhadap belanja pembangunan di Desa Taora

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,299 ^a	,090	,063	251615,438	1,745

a. Predictors: (Constant), pendapatan bumdes

b. Dependent Variable: belanja pembangunan

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel uji autokorelasi diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Waston sebesar 1,745 berada diantara -2 dan +2 yang berarti bahwa penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yaitu jika nilai Durbin Waston berada diantara -2 dan +2 berarti tidak ada gejala autokorelasi sehingga penelitian dan dapat dilanjutkan.

2. Analisis Persamaan Regresi

Persamaan regresi linier yang digunakan pada penelitian ini adalah persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = a + bX$. Tujuan digunakan regresi linier sederhana untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas (badan usaha milik desa) dengan variabel terikat (belanja pembangunan desa).

**Tabel 4.6 Hasil Uji Persamaan Linear
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	46965335,176	13078991,193		3,591	,001
	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa	-30,867	16,880	-,299	-1,829	,076

a. Dependent Variable: Belanja Pembangunan
Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui nilai constan (a) sebesar 46965335,176 sedangkan nilai Pendapatan Badan Usaha Desa (X) sebesar -30,867 sehingga persamaanya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 46965335,176 + (-30,867)X$$

$$Y = 46965335,176 - 30,867X$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Konstanta sebesar 46965335,176 maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai 46965335,176
- 2) Nilai koefisien regresi variabel independen bernilai negatif (-) sebesar -30,867, maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen meningkat maka variabel depenen akan menurun, begitu juga sebaliknya

3. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Uji statistik t menurut Kuncoro (2013) pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Adapun pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila $t_{tabel} > t_{hitung}$ atau signifikan lebih dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu.
- 2) Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau signifikan kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat keyakinan tertentu

Berikut adalah hasil uji parsial (t) pengaruh pendapatan badan usaha milik desa terhadap belanja pembangunan desa di Desa Taora

**Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	46965335,176	13078991,193		3,591	,001
	Pendapatan Badan Usaha Milik Desa	-30,867	16,880	-,299	-1,829	,076

a. Dependent Variable: Belanja Pembangunan
Sumber: Data Output SPSS 25 (2024)

Dalam penelitian ini, jumlah variabel bebas adalah 1 dan jumlah variabel terikat adalah 1, jadi jumlah keseluruhan variabel adalah 2. Dengan pengujian hipotesis probabilitas = 5% sedangkan derajat pengujian adalah $df = n - k$ yaitu, $36 - 2 = 34$. Jadi, untuk menentukan nilai t tabel, dapat dilihat pada lampiran tabel nilai t dengan signifikansi 5% (0.025) dengan df 34 yang menunjukkan nilai

2,03224 berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengaruh variabel pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap belanja pembangunan Desa Taora, menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} -1,829 < t_{tabel} 2,032$ dan $sig\ 0,076 > 0,05$. Artinya, bahwa pendapatan Badan Usaha Milik Desa Tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan Desa Taora.

4. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,299 ^a	,090	,063	251615,438	1,745

a. Predictors: (Constant), pendapatan bumdes

b. Dependent Variable: belanja pembangunan

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai koefisien (R square) adalah 0.063. Artinya, variabel pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijelaskan sebanyak 6,3%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 25, diperoleh hasil bahwa pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2020-2022 tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan di Desa Taora. Hal ini disebabkan oleh jumlah pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pertahunnya lebih kecil dibandingkan jumlah belanja pembangunan desa yang dialokasikan pertahunnya. Dikarenakan belanja

pembangunan desa yang tergolong tinggi, sehingga untuk memenuhi belanja pembangunan dibutuhkan dana desa lainnya seperti pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa dan bantuan keuangan dari provinsi, kabupaten/ kota.

Rendahnya Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga disebabkan karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih kurang maksimal, dalam hal ini hanya bergerak dalam satu dibidang yaitu koperasi simpan pinjam, sementara masih banyak sumber daya yang ada di Desa Taora, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berpotensi digunakan dalam membangun Usaha Desa. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani dan memiliki alam yang indah maka banyak bidang usaha yang dapat dibentuk seperti

- 1) vPariwisata yaitu memanfaatkan alam yang indah untuk membuka usaha pariwisata dalam desa
- 2) Perikanan yaitu memanfaatkan sumber air yang melimpah untuk membuat usaha perikanan yang kemudian target usahanya bukan hanya utuk masyarakat dalam desa namun juga utuk masyarakat luar.
- 3) Pertanian dan Perkenunan yaitu penjualan hasil-hasil pertanian dan perkebunan.
- 4) Sumber Daya Manusia. Selain sumber daya alam pembuatan usaha juga dapat berupa pemanfaatan sumber daya manusia yaitu usaha kreatif.

Hal ini didukung oleh buku saku dana desa yang mengatakan bahwa prioritas bidang usaha desa yaitu: pengelolaan sumberdaya alam, industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, jaringan distribusi, sektor keuangan dan permodalan,

dan pelayanan publik (Buku Saku Dana Desa, 2020). Dari hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Taora hanya memenuhi satu dari prioritas bidang usaha desa yaitu di sektor keuangan dan permodalan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Taora, badan usaha milik desa dalam bentuk koperasi simpan pinjam kurang maksimal dikalangan masyarakat desa yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dalam penggunaannya, masyarakat hanya menggunakan disaat ada kebutuhan mendesak. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pengelolaan badan usaha desa, sebagaimana terlihat didalam laporan keuangan bahwa pemasukkan perbulannya sangat kecil. Sementara itu sebagai desa yang terpencil dan masih minimnya pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, salah satu prioritas utama Desa Taora adalah pembangunan desa, baik pembangunan infrastruktur seperti Jalan, Perairan, Perrtanian, Air Bersih dan lain-lain, maupun pembanguna sumber daya manusia seperti Penidikan, Kesehatan dan UKM. Tentunya dalam hal ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga mengakibatkan jumlah anggaran belanja pembangunan desa tergolong lebih tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa Riski Amnan, dkk (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di kecamatan Malimbong Balepe, memperoleh hasil pendapatan asli desa tidak berpengaruh signifikan dan tidak positif terhadap belanja desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas (2017) tentang Pengaruh Alokasi Dana

Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron, dengan hasil yaitu pendapatan asli desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Suhairi (2016) Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Di Desa Kepayang dengan hasil bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan Y, dan korelasi diantaranya sangat kuat dan dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu pendapatan desa sangat berpengaruh terhadap belanja Desa di Desa kepayang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap belanja pembangunan di Desa Taora, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan di Desa Taora. Artinya belanja pembangunan desa dipengaruhi oleh sumber pendapatan desa lainnya. Hal ini dikarenakan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tergolong lebih kecil dibandingkan dengan belanja pembangunan yang ada di Desa Taora. Ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya bergerak disatu bidang usaha sehingga tidak dapat menyamai jumlah belanja pembangunan di Desa Taora.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu: Hanya menggunakan waktu 3 tahun, sehingga proses menganalisa kurang maksimal, karena sedikitnya data penelitian. Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang belanja pembangunan desa yang jumlah anggarannya tidak menetap setiap tahunnya, dan tidak berbanding dengan jumlah pendapatan badan usaha milik desa.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka saya sebagai penulis memberikan sedikit saran yaitu:

- 1) Kepada pemerintah Desa Taora untuk lebih meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menambah pendapatan desa. Dilihat dari banyaknya sumber daya yang ada di Desa Taora baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat di tingkatkan lagi, bukan hanya bergerak pada satu bidang.

Desa Taora sebagai salah satu desa yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan memiliki alam yang melimpah memberi potensi yang besar untuk Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti, koperasi produksi, penjualan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, wisata desa, usaha ternak, dan usaha kreatif. Dengan demikian hal maka pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pembangunan Desa, dan juga dapat menambah pendapatan dalam desa.

- 2) Kepada penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa agar memperhatikan instrumen-instrumen dalam penelitian, misalnya dalam memilih variabel penelitian untuk menggunakan lebih banyak variabel agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2015). *Accounting principle melalui pendekatan sistem informasi*. Universitas Kebangsaan, Jakarta
- Amnan, A. R., & Sjahruddin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* (1): 37-46
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Buntu Malangka Dalam Angka. Mamasa. Retrieved from <https://mamasakab.bps.go.id/publication/2020/04/27/cd83e0610bf3d0bdc2e8cedc/kabupaten-mamasa-dalam-angka-2020.html>
- Bintarto,R. (2010). *Desa Kota*. Alumni, Bandung
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101-113.
- Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). *PT Indeks, Jakarta*.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Elsa, E., Iskandar, S., & Tamsil, T. (2020). Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pendapatan Desa Terhadap Anggaran Belanja Desa Racang Welak Di Nusa Tenggara Timur. *Accounting Journal*, 1(2), 301-308.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat
- Harnanto. (2019). *Dasar - Dasar Akuntansi*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Hidayah, N. K. (2019). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sambilawang Periode 2015-2017)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Majapahit Mojokerto).
- Hoesada, J. (2014). *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta
Ibid, 246.

- Immanuel, S., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Dampak Pembangunan Situs Budaya Watuleley Di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Lia. (2017). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Lasena, S. S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Se-Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *Skripsi*, 1(921413207).
- Mardiasmo, D. (2018). *Akuntabilitas Sektor Publik Yogyakarta*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Martini, R., Zulkifli, Z., Hartati, S., & Widyastuti, E. (2020). Peran Pendapatan Desa untuk Belanja Desa di Kabupaten Lahat. *Ekonomi & Bisnis*, 19(2), 181-187.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung
- Notoatmodjo, S (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Kholifatul Hidayah, N. K. H. (2019). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sambilawang Periode 2015-2017)*
- Penali, A. B. (2015). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pante Deere Kecamatan Kabola Kabupaten Alor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri . Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa . 2005. Jakarta
- PUTRI, R. J. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Pengaplikasian Dan Implementasi Konsep Basis Data Relasional Pada Sistem Pendapatan Dan Pengeluaran. *no. June*, 1.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. CV Pustaka Setia, Bandung.

- Rosmini, R. (2021). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*
- Samryn, L. M. (2016). *Pengantar Akuntansi; Buku 2*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sari, D. G. (2010). Hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Siregar, S. (2014). *Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & spss*. Jakarta: Kencana.
- Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Sugiyono, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhairi, S. E. (2016). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(1).
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka baru.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistiyoningtyas, L.(2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simki Economic*, 1(03).
- Sumarto, S., Suryahadi, A., Arifianto, A., Sadler, K., & Akhmadi, N. (2004). *Tata kelola pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan: bukti-bukti awal desentralisasi di Indonesia*. SMERU.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.
- Suparno, A.Suhaenah. (2001). *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Desa. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 2014. Jakarta.

LAMPIRAN

1. Tabel Distribusi t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74895	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

2. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NELLA RENTAMI, Lahir di Taora, kecamatan Buntu Malanga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pada tanggal 02 Juli 1999. Anak dari pasangan KARSEA dengan ANITA, anak sulung dari tiga bersaudara yaitu DINDHO WILINDRI, WANDRA SEPRIES. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 028 Taora dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Buntu Malangka pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mamasa pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Sulawesi Barat kabupaten Majene dan mengambil jurusan Manajemen Keuangan sampai pada tahun 2022. Untuk memperoleh gelar S1 Ekonomi penulis menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Belanja Pembangunan di Desa Taora, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Tahun 2020-2022”**